

EVALUASI PEMBANGUNAN DI BIDANG INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PASCA PEMEKARAN DAERAH

Roland Sangen Brith¹

¹Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul
Alamat Korespondensi : rolandbrith88@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the development of post-expansion infrastructure of the region in East Kutai Regency which is focused on the development of road infrastructure. The period of development that is evaluated is the period of 2011-2015. The results of research Infrastructure development in East Kutai Regency for the period of 2011-2015 shows that the development of road infrastructure is still uneven due to the vast area of East Kutai Regency, constrained by funding problems, land issues with residents and weather problems. Development is hampered because the distance between each sub-district is so far that the development so far has only focused on the development of the Capital district only Sangatta.

Keyword : Evaluation of Development, Infrastructure

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pembangunan infrastruktur pasca pemekaran daerah di Kabupaten Kutai Timur yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan. Periode pembangunan yang dievaluasi adalah periode tahun 2011-2015. Hasil penelitian Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur periode tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan masih belum merata dikarenakan daerah Kabupaten Kutai Timur yang sangat luas, terkendala masalah dana, permasalahan lahan dengan warga dan permasalahan cuaca. Pembangunan terhambat dikarenakan jarak antar tiap kecamatan sangat jauh sehingga pembangunan sejauh ini hanya terfokus pada pembangunan Ibukota kabupaten saja yaitu Sangatta.

Kata Kunci : Evaluasi Pembangunan, Infrastruktur

Pendahuluan

Kabupaten Kutai Timur pada awalnya merupakan kecamatan yang terpisah jauh satu sama lain, namun setiap kecamatan memiliki basis ekonominya sendiri masing-masing yang memungkinkan perkembangan secara mandiri dari sumberdaya pertanian dan pertambangan.

Selain itu Kutai Timur sebelumnya merupakan wilayah yang luas namun memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Selain itu jaringan prasarana fisik antar kecamatan masih dalam bentuk jalan yang diperkeras dengan batu dan hanya sebagian kecil saja yang teraspal.

Prasarana fisik jalan antar kecamatan yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur kurang baik tetapi berpotensi untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri karena memiliki area pertanian yang luas.

Menyadari betapa pentingnya pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Timur maka sebagai daerah hasil pemekaran akan semakin giat dalam membangun terutama pembangunan sarana dan prasarana untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.

Pembangunan infrastruktur mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan dari masyarakat-masyarakatnya, sehingga apabila pembangunan fisik kurang memadai akan menghambat sektor lainnya, dan menghambat perkembangan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, sosial dan budaya.

Kerangka Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi secara tradisional artinya mengukur pencapaian suatu tujuan, berdasarkan perangkat yang dibuat sebelumnya secara hati-hati dari tujuan yang dapat diukur (Patton, 2009:30)

Lebih lanjut Patton menyatakan proses evaluasi dimaksudkan untuk menguraikan dan memahami dinamika internal berjalannya suatu program. Proses evaluasi kebanyakan memerlukan deskripsi rinci mengenai berjalannya sebuah program. Setiap deskripsi bisa jadi berdasarkan observasi dan wawancara dengan staf, klien dan petugas administrasi program.

Menurut pendapat Dimock, Dimock, dan Fox (1996:56) menyebutkan bahwa evaluasi adalah sebuah kegiatan yang bukan hanya dari segi pemantauan saja tetapi juga memastikan bahwa suatu program mengakibatkan suatu keberhasilan atau kegagalan.

Chadwick, Bahr, dan Albrecht (1991:35) menyatakan bahwa evaluasi bertujuan untuk menentukan seberapa baik tujuan program telah tercapai, dengan mengacu pada tujuan formal. Dijelaskan lebih lanjut bahwa asumsi yang tersirat dalam evaluasi program, yaitu lembaga/program memiliki tujuan tertulis yang jelas yang bisa dipakai untuk mengevaluasi kemajuan program serta tujuan dari program tersebut tidak boleh berubah selama berlangsungnya program.

Pengertian lain dikemukakan oleh Rossi yang dikutip oleh Chadwick, et al (1991), yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi dan manfaat aktifitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara- cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menyebutkan bahwa evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Konsep Pembangunan

Pembangunan tidak hanya dilihat sebagai suatu hasil tertentu, tetapi juga melihat bagaimana proses dari pembangunan tersebut berjalan sehingga arahnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Semua faktor yang mendukung dan berkaitan dengan pembangunan seperti lingkungan, sosial dan ekonomi harus dapat dikenali untuk dapat

mengoptimalkan proses penyelenggaraan pembangunannya sehingga dapat mengantarkan perubahan seperti yang dikehendaki atau direncanakan.

Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian:1994).

Menurut Myrdal yang dikutip oleh Kuncoro (2004) mengatakan bahwa pembangunan adalah pergerakan ke atas dari seluruh sistem social. Dapat diartikan bahwa pembangunan merupakan perubahan kearah yang lebih baik dilihat dari semua aspek sosial seperti sosial, ekonomi, budaya dan lainnya.

Sedangkan menurut Effendi (2002) Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang ada secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan.

Selanjutnya menurut Todaro (1993), Pembangunan adalah suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan soal pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial dengan perubahan mendasar tentang kelembagaan, sosial dan struktur administrasi serta sikap masyarakat dan bahkan dalam banyak hal, kebiasaan dan kepercayaan.

Marbun (1997) menyatakan agar pembangunan dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Rencana yang baik, masuk akal dan dapat direalisasikan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Tersedianya sumber tenaga manusia, modal dan sumber daya lainnya.
3. Adanya organisasi yang mampu mewujudkan rencana menjadi berhasil.

Pembangunan Infrastruktur

Menurut Fadjar Suryanto dari Puslitbang Iptekhan Balitbang Dephan, menyatakan infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan, dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan Infrastruktur seyogyanya diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdaya guna tinggi serta pengelolaan.

Lebih lanjut lagi Fadjar Suryanto menyatakan infrastruktur dapat digolongkan kedalam beberapa kategori antara lain:

1. Obyek Rahasia, yaitu meliputi gedung pusat pemerintahan, pusat penelitian, instansi militer, instansi polisi, BIN.
2. Obyek vital, yaitu meliputi pusat dan jaringan listrik, pusat dan jaringan komunikasi, pusat perdagangan, pusat eksplorasi, pusat konsentrasi masyarakat, bendungan, sarana dan prasarana transportasi, sentra sembilan bahan pokok, kawasan industri.
3. Obyek strategis, yaitu meliputi pabrik alat tempur militer, pabrik obat-obatan, radar pengamat, garis perbatasan.
4. Obyek umum yaitu meliputi bangunan fasilitas social dan fasilitas umum seperti infrastruktur untuk pendidikan, peribadatan, tempat hiburan, taman, jalur hijau.

Sarana dan prasarana tersebut sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan meningkatkan pendapatan sosial ekonomi serta dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berada didaerah.

Menurut Grigg dalam Kodoatie (2005) Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Grigg (2005) bahwa infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsi sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting.

Secara lebih spesifik Stone dalam Kodoatie (2005) menyatakan infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas. Fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfalisasi tujuan-tujuan ekonomi.

Dari beberapa pendapat diatas tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur adalah proses perubahan yang berlangsung dan terus-menerus dan terencana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sarana dan prasarana fisik atau infrastruktur yang dapat menunjang aktivitas masyarakat dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan yang lainnya.

Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk. Kedua istilah tersebut secara akademik bisa dibedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan. Karena itu tidak

mungkin masalah otonomi daerah dibahas tanpa mempersandingkannya dengan konsep desentralisasi.

Kedua istilah tersebut bagaikan dua mata koin yang saling menyatu namun dapat dibedakan. Dimana desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara Negara, sedangkan otonomi daerah menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.

Berbagai definisi tentang desentralisasi dan otonomi daerah telah banyak dikemukakan oleh para ahli sebagai bahan perbandingan dan bahasan dalam upaya menemukan pengertian yang mendasar tentang pelaksanaan otonomi daerah sebagai manifestasi desentralisasi.

Otonomi dalam makna yang sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang luas diartikan berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar (Tim ICCE UIN:2000).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tim ICCE UIN (2000) menjelaskan adanya alasan lain yang didasarkan pada kondisi ideal, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (desentralisasi) sebagaimana dinyatakan oleh The Liang Gie adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintahan setempat, pengurusannya diserahkan kepada pemerintahan daerah.
4. Dari sudut kultur, desentralisasi perlu diadakan agar perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintahan daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Pemekaran Daerah

Pembentukan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih suatu daerah.

Pemekaran daerah merupakan amanat dari implementasi yang tercantum pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan konsep desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam PP RI Nomor 129 Tahun 2000 Pasal 2 disebutkan pembentukan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan kecamatan dan ketertiban

Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu fakta dengan menggunakan variabel mandiri sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2012:11) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literature, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kutai Timur

Perencanaan sebuah program merupakan sebuah proses yang sangat vital bagi pembangunan dikarenakan untuk melaksanakan sebuah pembangunan yang baik tentu saja pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus

memiliki sebuah perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan jalan sangat penting dikarenakan jalan merupakan akses dalam melaksanakan kegiatan sosio-ekonomi yang mana sebagian besar masyarakat Kabupaten Kutai Timur bekerja di bidang pertanian, perkebunan dan pertambangan yang sangat membutuhkan akses jalan yang memadai.

Pemenuhan kapasitas infrastruktur dengan mengacu pada tata ruang wilayah sehingga terwujud keterpaduan, ini merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam hal pemerataan ekonomi daerah (daya beli masyarakat), tingkat pendidikan, kesehatan dan daya saing daerah terutama pada keberlangsungan pergerakan barang dan jasa beserta akses antar wilayah. Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya.

Dalam perencanaan pembangunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur dilakukan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat dengan mengacu pada visi dan misi daerah, kebijakan pembangunan daerah telah ditetapkan pada dokumen perencanaan RPJPD dan RPJMD.

Pemantauan Pembangunan Jalan Kabupaten Kutai Timur 2011-2015

Pelaksanaan program pembangunan jalan di Kabupaten Kutai Timur periode 2011-2015 masih memiliki beberapa kendala yaitu:

1. Luas wilayah Kutai Timur.
Kondisi wilayah yang luas menjadi kendala dikarenakan kondisi yang luas memerlukan akses jalan yang banyak dan tentu saja dana yang tidak sedikit. Dengan wilayah yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata membuat Dinas Pekerjaan Umum harus melakukan pembangunan sesuai dengan efektivitas dan efisiensi di daerah mana saja akan dilaksanakan pembangunan.
2. Kesadaran masyarakat
Proses pembebasan lahan untuk dijadikan lokasi yang dilakukan pembangunan jalan menjadi masalah besar. Hal ini dikarenakan masyarakat masih belum bisa merelakan tanah milik mereka untuk dijadikan lokasi pembangunan jalan. Pada permasalahan pembebasan lahan, masyarakat masih banyak yang tidak menerima tentang biaya ganti rugi dari pemda Kutai Timur. Untuk tanah tanpa tanam tumbuh pemda menyediakan dana 50 juta per hektar. Sementara untuk tanaman yang sudah ada tanam tumbuh, pemda menyediakan dana sebesar 130 juta per hektar. Masyarakat merasa dirugikan dengan besarnya biaya ganti rugi yang disediakan oleh masyarakat.
3. Dana
Sumber pendapatan Kabupaten Kutai Timur sebagian besar berasal dari pertanian, perkebunan dan pertambangan. Dana Untuk Pembangunan Infrastruktur jalan berdasar dari APBD Kutai Timur setiap tahun. Dana sendiri juga menjadi masalah dikarenakan dana

untuk pembangunan jalan sendiri terbatas sehingga tidak dapat melakukan pembangunan secara menyeluruh tetapi bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat, efisiensi dan efektivitas keberadaan jalan yang akan dibangun di daerah. Dana untuk pembangunan jalan per tahun hanya dialokasikan sekitar 100 miliar setiap tahunnya. Melihat luasnya daerah Kutai Timur dana sebesar itu masih kurang bahkan ada beberapa proyek yang bersifat multi years dikarenakan dana setiap tahun yang kurang sehingga harus diselesaikan dalam lebih dari 1 tahun anggaran. Dinas Pekerjaan Umum sudah melaksanakan pembangunan jalan dengan maksimal sesuai dengan dana yang tersedia dengan melihat aspek efisiensi, efektivitas dan kebutuhan daerah. Pengerjaan jalan dilakukan secara bertahap dan tidak dilakukan langsung secara menyeluruh.

Penilaian Dampak Pembangunan Jalan Kabupaten Kutai Timur 2011-2015

Dengan pemekaran pemerintah daerah terus menerus melakukan pembangunan jalan demi lancarnya kegiatan sosial dan ekonomi Kabupaten Kutai Timur.

Dampak dari pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah positif bagi masyarakat. Masyarakat lebih mudah untuk bertransportasi melakukan kegiatan dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Perlu diketahui jarak antar kecamatan ke kecamatan lain sangat jauh. Untuk menempuh jalan darat memerlukan waktu 2-4 jam sebelum pemekaran. Tetapi pada saat ini akses jalan yang telah dibangun dan ditingkatkan kualitasnya membuat jarak yang ditempuh berkurang. Ini merupakan sebuah hasil yang positif dari kerja keras Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan bekerja sama dengan masyarakat.

Beberapa proyek pembangunan yang dirasa berdampak positif menurut Bapak Aswandini melalui wawancara adalah sebagai berikut:

1. Jalan Simpang Kabo.
Jalan ini mengarah ke kecamatan Rantau Pulung dan jalan ini ditingkatkan untuk mempermudah akses ke kecamatan Rantau Pulung serta mempermudah akses warga sekitar. Di Jalan Kabo diketahui ada 4 Sekolah, yaitu Sekolah St. Fransiskus Tingkat TK, SD, SLTP, dan SLTA.
2. Pembangunan jalan dan peningkatan jalan Poros Kecamatan Rantau Pulung menuju beberapa daerah seperti daerah Tepian Indah, Sei Benu serta jalan dalam Kecamatan Rantau Pulung sendiri.
3. Pemeliharaan Jalan Bukit Pelangi.
Jalan Bukit Pelangi adalah sarana jalan berdampak positif bagi masyarakat karena banyak masyarakat Kutai Timur yang setiap hari melalui jalan ini. Diketahui jalan ini menuju daerah perkantoran Pemda Kutai Timur. Meskipun daerah perkantoran tetapi masyarakat sering melalui jalan ini untuk keperluan rekreasi seperti jalan-jalan

sore, jogging, bersantai di taman sekitar daerah bukit pelangi. Ada beberapa taman yang dapat ditemui di daerah bukit pelangi dan Pemerintah Daerah Kutai Timur juga menyediakan beberapa sarana di sekitar taman salah satunya adalah kursi untuk bersantai.

4. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan dalam kota Sangatta.

Jalan dalam kota Sangatta yang sebelumnya berjenis aspal ditingkatkan menjadi jalan yang sudah disemenisasi.

Efisiensi Sumber/Efisiensi Ekonomi

Efisiensi sumber/Efisiensi ekonomi adalah kegiatan dimana mencari sebuah cara yang paling efektif dengan biaya yang sedikit murah untuk mencapai tujuan program.

Pendanaan untuk program pembangunan jalan didapat dari APBD daerah Kabupaten setiap tahunnya. Dalam implementasi proyek infrastruktur jalan di Kutai Timur merupakan tugas pemerintah daerah dimana dimulai dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda dalam hal rencana pendanaan pembangunan fisik yang salah satunya adalah pembangunan proyek infrastruktur jalan. Langkah selanjutnya adalah ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang ada di birokrasi pemerintah Kabupaten Kutai Timur yaitu Dinas Pekerjaan Umum sebagai unit yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan di wilayah Kutai Timur.

Dinas Pekerjaan Umum dapat melibatkan rekan kerja yang ada di lingkungan Kabupaten. Rekan kerja yang dimaksud disini adalah kontraktor dan konsultan perencana yang memang memiliki usaha yang sejalan dan merupakan pihak swasta. Alasan keterlibatan pihak swasta adalah karena pihak Pemerintah Daerah berusaha bersikap profesional, artinya mencoba untuk memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat. Hasil terbaik yang dimaksud adalah masyarakat akan dapat menikmati fasilitas jalan yang berkualitas. Keunggulan jika proyek fisik pembangunan jalan ini ditenderkan, kita akan cepat melakukan kegiatan pembangunan sehingga lebih efektif dan efisien.

Walaupun sudah melibatkan pihak swasta Dinas Pekerjaan Umum masih memiliki kendala-kendala menyangkut masalah dana sehingga ada beberapa proyek pembangunan jalan yang diselesaikan dalam waktu yang cukup lama.

Kebutuhan infrastruktur di Kutim sangat tinggi sementara ketersediaan waktu dan dana terbatas, karenanya pembangunan infrastruktur dilakukan dengan sistem tahun jamak atau *multy years* meski dengan resiko biaya jadi lebih besar karena harus mempertimbangkan inflasi dan sebagainya.

Tidak semua tidak semuanya proyek tahun jamak itu dilaksanakan bersamaan tahun 2011, namun ada juga baru di mulai kontraknya 2014 lalu. Ada proyek yang waktunya selesai bulan Mei, Juni, Agustus 2015. memang ada kendala dilapangan untuk mengejar target, misalnya terkendala

cuaca hujan dan atau banjir, namun tidak ada merubah waktu dan target sesuai kontrak, yakni semua selesai pada akhir tahun 2015. Sedangkan proyek infrastruktur jalan Sangatta-Rantau Pulung progresnya agak terhambat cuaca dan sering longsor namun telah tuntas sesuai kontrak Tahun 2015.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Perencanaan pembangunan jalan sudah dilakukan sesuai prosedur dimulai dari sesuai dengan penjabaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2011-2015 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015, serta 2016. RKPD Kabupaten Kutai Timur harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam rangka menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.

Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan tidak membuat proyek pembangunan jalan terbengkalai dan tetap diselesaikan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.

Dampak pembangunan jalan sangat positif bagi masyarakat Kutai Timur dikarenakan jalan sudah semakin baik dan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonomi. Akses antar kota dan antar kecamatan juga semakin mudah dikarenakan peningkatan dan pembangunan jalan yang dilakukan.

Pelaksanaan pembangunan jalan dilakukan secara efektif dan efisien karena pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana anggaran yang dibuat oleh Bappeda dan dilakukan secara teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan melibatkan pihak swasta. Pelaksanaan pembangunan jalan juga berjalan sesuai target dan selesai sesuai jadwal.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang ada, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Sebaiknya berkomunikasi dengan DPRD Kabupaten dalam hal merancang Peraturan Daerah yang dengan jelas merincikan tentang proses dan besarnya ganti rugi lahan bagi masyarakat yang terkena jalur pembangunan dengan harga yang pantas agar tidak ada lagi proses pembebasan lahan yang memakan waktu.

Sebaiknya memperhitungkan dana dan waktu yang tersedia secara realistis saat perencanaan pembangunan sehingga target tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak memakan waktu yang lama.

Pemerintah Daerah seharusnya bersosialisasi mengenai proyek pembangunan kepada masyarakat yang terkena dampak serta dengan menunjukkan peraturan resmi mengenai pembangunan jalan, batas jalan

dengan rumah warga agar tidak terjadi selisih paham antara Dinas Pekerjaan Umum dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang *Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah*.
- Chadwick, Bruce A., et al. 1991. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. IKIP Semarang Press. Semarang.
- Dimock, Marshall E., et al. 1996. *Administrasi Negara*. Edisi ke-5. Jilid 2. Erlangga. Jakarta.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Cetakan Pertama. Ohaido dan Offset. Jakarta.
- Kodoatie, Robert. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Marbun, B.N. 1997. *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000*. Erlangga. Jakarta
- Siagian, Sodang P. 1994. *Pokok- pokok Pembangunan Masyarakat*. Bharata. Jakarta.
- _____. 2005. *Fungsi- Fungsi Manajerial*. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
- TIM ICCE UIN. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Prenada Media. Jakarta.
- Todaro, Michael P. 1993. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.